

EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PESANTREN

Ahmad Misbah

Abstrak

Pesantren diawal berdirinya merupakan pusat pendidikan dan pengajaran Agama Islam, penguatan nilai-nilai Agama Islam bahkan sebagai pusat penyemaian penyiaran agama Islam, kini didalam perkembangannya semakin luas bidang garapannya mengikuti perubahan dan perkembangan zamannya. Pesantren tidak hanya berkonsentrasi pada bidang garapan spiritual saja namun kesadaran dan kepekaan sosial bermasyarakat menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Pemberdayaan ekonomi adalah konsep yang lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang berpihak kepada mayoritas masyarakat yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi. Realitas sosial menggambarkan bahwa pesantren merupakan lembaga yang sangat potensial dalam menggerakkan ekonomi berbasis pesantren. Pesantren harus bergerak aktif progresif dan responsif terhadap kemajuan ekonomi mikro dimasa yang akan datang.

Pesantren harus menyadari betul akan potensinya. Potensi tak lain adalah sebuah energi, daya kekuatan yang belum sepenuhnya digunakan secara optimal. Potensi merupakan kekuatan terpendam yang patut digali, ditingkatkan dan dikembangkan melalui sarana dan prasarana pendukung yang tepat dan baik sebagai langkah dalam mencapai kesejahteraan. Potensi ekonomi pesantren adalah kemampuan ekonomi yang terdapat di pesantren yang memungkinkan dan layak dikembangkan sehingga menjadi sumber penghidupan pesantren dan masyarakat sekitar bahkan mampu mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dan berkesinambungan. Mengacu pada kegiatan ekonomi maka diantara potensi ekonomi pesantren yang patut mendapatkan perhatian dan dikembangkan adalah potensi produksi, potensi distribusi dan potensi konsumsi.

Kata kunci: Ekonomi kerakyatan, Pemberdayaan ekonomi, Ekonomi

A. Pendahuluan

Pesantren telah menempati posisi yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat, keberadaannya sangat didukung oleh masyarakat sebagai basis kekuatannya. Sumbangsih pesantren dalam upaya

membangkitkan semangat masyarakat mencari kehidupan yang lebih maju dan baik merupakan catatan panjang sejarah bangsa Indonesia didalam menempuh kehidupan yang lebih sejahtera. Apalagi di era globalisasi, millineal dan transformasi yang mempunyai pengaruh cukup significant bagi perubahan disegala bidang kehidupan.

Pesantren diawal berdirinya merupakan pusat pendidikan dan pengajaran Agama Islam, penguatan nilai-nilai Agama Islam bahkan sebagai pusat penyemaian penyiaran agama Islam, kini didalam perkembangannya semakin luas bidang garapannya mengikuti perubahan dan perkembangan zamannya. Pesantren tidak hanya berkonsentrasi pada bidang garapan spiritual saja namun kesadaran dan kepekaan sosial bermasyarakat menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Pesantren tak lagi terkooptasi dengan kurikulum berbasis keagamaan [*relegion based curricullum*] yang cenderung melangit namun sekarang kurikulum menyentuh ranah sosial kemasyarakatan kekinian [*society based curricullum*]. Pesantren tidak lagi dilebeli sebagai lembaga keagamaan ansich, namun sudah menjadi lembaga sosial masyarakat yang aktif dimana senantiasa merespon persoalan masyarakat sekitar dan umat pada umumnya. Indikasi jelasnya nampak pada para lulusan pesantren yang tidak alergi dan mampu beradaptasi dengan dunia luar. Aktifitas merambah keberbagai wilayah, mulai dunia pendidikan, sosial, politik bahkan kewirausahaan dan lain sebagainya ¹.

Dewasa ini potensi dan perkembangan pesantren diharapkan tidak hanya hanya memainkan fungsi tradisionalanya yaitu : transmissi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama, tapi juga harus menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakatpedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup / konservasi alam, dan yang lebih penting

¹ Mastuki HS dan M Ishom Elsha, *Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta, 2006, hal 1

lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya². Disini fungsi pesantren tidak terbatas sebagai pusat pengkaderan ulama dan lembaga pencetak sumber daya manusia namun harus mereposisi menjadi lembaga yang mampu dan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Mengutip pernyataan Weber dalam *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* : *Religion is really economics, politics is really religion and economics is really politics*³ . Terdapat keterkaitan antara agama dan struktur sosial bahkan agama bersentuhan dengan kepentingan sosial ekonomi, maka realitas yang terjadi pola pikir, perilaku dan tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh agama, itulah implikasi yang tak mungkin dinafikan.

B. Metode Pembahasan

Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sebuah sistem perekonomian yang mempunyai tujuan dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Terdapat tiga prinsip utama dalam ekonomi kerakyatan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Prof. Sri Edi Swasono memaparkan bahwa ciri-ciri ekonomi kerakyatan⁴ adalah :

² Azyumardi Azra, Jaringan Ulama, Mizan, Bandung, 1997, hal Xxii

³ Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, London, 1930, hal 7

⁴ Mubyanto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara, Jakarta, 2014, hal 48

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berdasar Ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba'
3. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi berdasar kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan
4. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak
5. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama.

Sementara Prof Mubyanto Lahir di Sleman, Yogyakarta 3 September 1938 dan meninggal pada 24 Mei 2005 di Yogyakarta. Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Gajah Mada. Selama hidupnya dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia dan penggagas konsep

Ekonomi Pancasila bahwasanya sistem ekonomi kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional

Indonesia yang berdasar kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan keberpemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya ⁵.

Saat ini interpretasi ekonomi kerakyatan merupakan perlawanan terhadap kapitalis, indikator ekonomi kerakyatan adalah *human development index* (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi

⁵ Mubyanto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara, Jakarta, 2014, hal 8-9

konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada *human development index*. Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Sebagai contoh, kesejahteraan rakyat, Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Indonesia menempati peringkat paling rendah di *ASEAN Five*, namun kalau kita perhatikan dalam hal jumlah gedung bertingkat tinggi *sky building*, jumlah orang paling kaya, Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok. Sementara dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada pada posisi paling bawah, nomor 1 disusul Singapura dan Malaysia di urutan kedua, untuk nomor 3 ditempati Thailand⁶.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pesantren dan Perberdayaan Ekonomi Rakyat

Transformasi sosial merupakan visi besar berdirinya pesantren ditengah-tengah masyarakat. Semangat pengabdian kepada masyarakat dengan mengemban amanat agung dalam mengembangkan dakwah Islam dalam dimensi yang luas, membangun, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang pada akhirnya mendapat legitimasi dan dukungan mereka. Peran pesantren dalam lintasan sejarah pendidikan Islam Indonesia tak mungkin diragukan. Pesantren telah menjadi khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Kontribusi yang besar telah ditorehkan pesantren dalam kanvas pendidikan dan pembentukan sumberdaya manusia Indonesia secara kuantitas maupun kualitas jauh sebelum berdirinya sekolah.

Pesantren sejak berdiri pada abad ke 14 Masehi telah memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama, lembaga dakwah bahkan sebagai pusat perjuangan rakyat dalam menentang

⁶ Ibid hal, 11-12

penjajahan. Peran dan fungsi pesantren yang strategis juga mengikuti perkembangan zaman. Diantaranya, pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat adalah respon terhadap masa pemerintahan orde baru⁷. Di era 2000 an pesantren telah berfungsi menjadi pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, disini pesantren mengembangkan koperasi. Maka muncul Kopontren sebagai lembaga dibawah naungan Kemenag / Depag yang berupaya memfasilitasi beberapa kegiatan perkoperasian pesantren. Saat inipun, di era millineal posisi pesantren telah menunjukkan elan vitalnya dalam arus perubahan. Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga pengambil kebijakan dalam sistem perekonomian Indonesia melalui Gubernurnya, Perry Wariyo menyampaikan pada acara *high level discussion* " Fastabiqul Khairat melalui Pesantren sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal " , yang diselenggarakan sebagai rangkaian Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018 pada 11 sd. 15 Desember 2018 di Surabaya bahwa ada tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia ;

1. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren.
2. Kedua, mendorong terjalannya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan *virtual market* produk usaha pesantren sekaligus *business matching*.
3. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa pesantren senantiasa bergerak melakukan inovasi, responsif terhadap perubahan zaman. Pesantren dengan segala potensinya cukup mempunyai daya tawar bagi perubahan masyarakat Indonesia namun upaya marginalisasi pesantren juga patut dicermati.

⁷ Ziemek Manfred, Pesantren dalam Perubahan Sosial, Jakarta, P3M, 1986, hal 211

Konsep pemberdayaan [*empowerment*] berasal dari kata *power* yang mempunyai arti kekuasaan atau keberdayaan. Ide pemberdayaan sangat bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Sementara kekuasaan berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki pihak tertentu untuk membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat pihak lain ⁸.

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang atau kelompok. Kelompok yang lemah dan tak berdaya sehingga mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk ⁹ ;

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*)
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan
3. Berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan

Pemberdayaan haruslah dilihat dari tujuan, proses, dan bagaimana cara pemberdayaan dilakukan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut ¹⁰ ;

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal, 57

⁹ *Ibid.*, hal, 58.

¹⁰ *Ibid.*, hal, 58 - 59

4. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Terdapat tiga motif ketika pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat. Pertama, motif agama, bahwa kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. Kedua, motif sosial, bahwa kiai adalah sosok pemimpin yang setidaknya harus mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat setempat. Ketiga, motif politik, bahwa penguasa setempat mempunyai kepentingan-kepentingan baik dalam skala mikro maupun makro. Di sini keberadaan pesantren sangat penting ditengah-tengah masyarakat yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat moril maupun materiel, lahir dan batin ¹¹.

Dengan demikian maka pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi berarti serangkaian aktifitas dalam upaya memperkuat kekuasaan kelompok lemah secara ekonomi dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan harus dilihat dari hasil yang hendak diraih dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan dalam pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi adalah konsep yang lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang berpihak kepada mayoritas masyarakat yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi ¹². Realitas sosial menggambarkan bahwa pesantren merupakan lembaga yang sangat potensial dalam menggerakkan ekonomi berbasis pesantren. Pesantren harus bergerak aktif progresif dan responsif terhadap kemajuan ekonomi mikro dimasa yang akan datang ¹³.

¹¹ Achmad Zaini, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998, hal, 126

¹² Prajono, O.S dan Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit CSIS, 1996, hal, 269.

¹³ Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, dalam *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta, LKIS, 2009, hal, 251

Beberapa langkah kongkret yang dilakukan oleh pesantren, diantaranya ;

1. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat dan alumni pesantren dimotivasi untuk membuka usaha-usaha kreatif mandiri dirumah sekitar pesantren [home industry]
2. Pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Pesantren mendirikan koperasi-koperasi dilingkungannya, dimana para ustadz dan santri terlibat dalam mengelolanya dan bertanggung jawab secara manajemen dan operasional. Koperasi menerima barang, makanan minuman dan lainnya dari masyarakat sekitar.
3. Pesantren membekali para santrinya dengan ketrampilan berwirausaha. Santri ketika terjun ke dunia masyarakat mampu untuk berdikari dengan membuka usaha sebagai lapangan pekerjaannya sementara dakwah adalah amanat yang mesti diembannya. Disisi lain tidak semua santri akan menjadi ulama.
4. Pesantren membuka dan mendirikan unit-unit usaha produktif. Usaha produktif didirikan dan dikembangkan dengan tujuan agar dapat menopang biaya operasional pesantren, meningkatkan kesejahteraan warga pesantren bahkan untuk mengembangkan pesantren yang pada akhirnya tercipta kemandirian pesantren.
5. Pesantren menghimpun para alumni yang mempunyai usaha dalam forum bisnis alumni, membuka jalinanan kerjasama [networking] yang kuat guna pengembangan ekonomi umat / rakyat.

6. Pesantren menyikapi global economic dengan merambah model bisnis online. Bisnis dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural¹⁴. Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Potensi Perekonomian Pesantren

Pesantren di Indonesia yang mencapai ribuan jumlahnya jelas mempunyai potensi besar dalam bidang ekonomi. Potensi yang dimiliki pesantren saat ini cukup mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun yang lainnya. Secara historis kemandirian pesantren sudah teruji dan sumbangsihnya pada bangsa dan negara Indonesia menjadi suatu yang tak mungkin dinafikan. Saat ini pesantren harus dapat mampu berperan sebagai lembaga yang menjadi dinamisor dan katalisator pemberdayaan sumberdaya manusia dan penggerak pembangunan disegala sektor, termasuk sektor ekonomi¹⁵. Semboyan *al muhafadotu 'alal qodimish sholih wal akhdu bil jadidil ashlah* menjadi pemicu semangat pesantren untuk terus eksis dalam sistem budaya global. Pesantren secara

¹⁴ Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta, 1999

¹⁵ Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, IRD Press, Jakarta, 2004, hal, 193 - 194

terus menerus menggali segala potensi yang ada, termasuk potensi ekonominya.

Kekuatan yang dimiliki pesantren merupakan potensi besar untuk dapat melakukan pemberdayaan umat dibidang ekonomi. Langkah pemberdayaan ekonomi merupakan dakwah bil hal dan upaya mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diembannya secara kongkrit / aplikatif. Islam memandang bahwa ekonomi merupakan wasilah bukan maqosid, ekonomi adalah salah satu cara dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran Islam menekankan bahwa harta dan kegiatan ekonomi merupakan amanah dari Allah SWT sang pemilik mutlak apa yang ada dimuka bumi ini ¹⁶. Oleh sebab itu orang yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan menambah harta melalui jalan yang sesuai dengan syari'at Islam, seperti dengan cara bersedekah tidak dengan cara-cara ribawi sebab sedekah akan meningkatkan dampak positif terhadap harta kekayaan ¹⁷.

Pesantren harus menyadari betul akan potensinya. Potensi merupakan sebuah energi, daya kekuatan yang belum sepenuhnya digunakan secara optimal. Potensi merupakan kekuatan terpendam yang patut digali, ditingkatkan dan dikembangkan melalui sarana dan prasarana pendukung yang tepat dan baik sebagai langkah dalam mencapai kesejahteraan. Potensi dalam aktifitas perekonomian mempunyai arti segala sesuatu yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan nilai manfaatnya sehingga mempunyai dampak ekonomi yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Potensi ekonomi pesantren adalah kemampuan ekonomi yang terdapat di pesantren yang memungkinkan dan layak dikembangkan sehingga menjadi sumber penghidupan pesantren dan masyarakat sekitar

¹⁶ Antonio, Muh. Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Paraktek, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal, 143

¹⁷ Al-Bahi, Manhaj al-Qur'an fi Tawtir al-Mujtama, Dar al-Fikr, Beirut, 1974, hal,157

bahkan mampu mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dan berkesinambungan ¹⁸.

Mengacu pada kegiatan ekonomi maka diantara potensi ekonomi pesantren yang patut mendapatkan perhatian dan dikembangkan adalah potensi produksi, potensi distribusi dan potensi konsumsi.

1. Potensi Produksi,

Pesantren dengan kepemilikan lahan yang cukup luas, mempunyai banyak tenaga kerja [santri dan masyarakat sekitar] dan memiliki teknologi untuk aktifitas produksi merupakan indikator bahwa pesantren merupakan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pesantren yang memiliki lahan pertanian, perkebunan, pertambakan dan bergerak di sektor tersebut akan sangat berpotensi menjadi produsen dibidang tersebut. Pesantren yang menfokuskan pada industri skala kecil dan menengah sangat berpeluang menjadi pelaku industri. Pesantren dengan kekuatan keilmuannya [*Turost Islam*], kajian dan telaah hukum Islam sangat memungkinkan menjadi penerbit buku dan berperan di industri percetakan. Disini usaha pesantren untuk menghasilkan, mengubah barang dan jasa agar bernilai tinggi merupakan bentuk potensi produksi pesantren ¹⁹.

2. Potensi Distribusi

Usaha dibidang distribusi merupakan salah satu usaha dibidang pemasaran produk dimana aktifitasnya menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen ²⁰. Dalam hal ini pesantren sangat berpotensi dalam menangkap peluang usaha ini. Pesantren dengan kekuatan jaringannya, santri, para alumni dan jaringan pesantren akan menemukan sisi bergainingnya dalam membangun bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis dengan mengandalkan kekuatan networknya.

¹⁸ Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, 2002, hal 99

¹⁹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 33

²⁰ Warren J. Keegan, *Manajemen Pemasaran Global*, Jakarta : PT Indeks Gramedia, 2003, hal 136

3. Potensi Konsumsi

Konsumsi merupakan aktifitas yang pasti sering dilakukan oleh manusia dalam kegiatan ekonominya. Banyaknya jumlah pesantren yang tersebar di pelosok negeri Indonesia dan dengan jumlah santri yang banyak pula adalah hal yang sangat potensial dalam kegiatan ekonomi dibidang konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktifitas yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dari hasil produksi baik berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan ²¹. Daya serap pesantren dan santri terhadap jumlah barang produksi merupakan bukti yang sangat signifikan bahwa pesantren memiliki daya konsumsi yang tinggi. Maka para produsen dan distributor bahkan dunia industri selayaknya menjadikan pesantren sebagai sasaran pemasaran produksi, terlebih sebagai mitra dalam membangun perekonomian.

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kontribusi pesantren sebagai lembaga yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia tak mungkin dinafikan begitu saja. Sejarah telah mencatat betapa signifikannya peran dan posisi pesantren dalam dinamika pembangunan bangsa Indonesia. Saat inipun dapat disaksikan bagaimana pesantren mengambil peran kebangsaan. Secara kuantitas maupun kualitas, pesantren menjadi lembaga yang layak diperhitungkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Geliat perekonomian pesantren adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi rakyat mulai tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik. Aktifitas ekonomi pesantren diawal tujuannya untuk kemandirian lembaga telah menjadi modal besar yang sangat potensial dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Langkah strategis harus diambil oleh pesantren dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat / rakyat.

²¹ Soeharno, Teori Mikro ekonomi, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2007, hal. 6

Pesantren bukan lagi lembaga eksklusif melainkan inklusif dimana arus globalisasi, era teknologi komunikasi informasi, dan revolusi industri 4.0 harus direspon secara positif untuk pengembangan ekonominya dan menjadi bagian untuk memperkaya eksistensinya di abad milenial ini. Pesantren adalah lembaga yang integritasnya tinggi dengan potensi yang besar akan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat yang bergerak secara masif produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahi, *Manhaj al-Qur'an fi Tawfir al-Mujtama*, Dar al-Fikr, Beirut 1974
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, Bandung, Mizan, 1997
- Haidari, Amin dkk, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta, IRD Press, 2004
- Manfred, Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta; P3M, 1986
- Mastuki HS dan M Ishom Elsha, *Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta, 2006
- Max Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, London, 1930
- Mubyanto dkk, *Ekonomi Kerakyatan, Lembaga Suluh Nusantara*, Jakarta, 2014
- Muh. Syafi'i, Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Prajono, O.S dan Pranarka, A.M.W., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit CSIS. 1996
- Soeharno, *Teori Mikro ekonomi*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2007
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2005

Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, 2002, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

Syam, Nur, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren, dalam Manajemen Pesantren*, Yogyakarta, LKIS, 2009

Warren J. Keegan, *Manajemen Pemasaran Global*, Jakarta : PT Indeks Gramedia, 2003,

Zaini, Ahmad, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998